

Memahami dan Membangun Pendekatan Penyelesaian Deforestasi dan Degradasi Hutan di Region Sumatera dan Kalimantan

Understanding and Building an Approach for the Solution of Deforestation and Forest Degradation in Sumatera and Borneo Region

Yayan Hadiyan¹, Yuliah¹, Haryo Pambudi²

¹Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan tanaman Hutan

²Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

*Corresponding author: yhadrian@biotifor.or.id

Abstract: Kerusakan hutan yang terus berlangsung cepat di Indonesia membutuhkan pendekatan penyelesaian yang tepat. Berbagai factor penyebab kerusakan tersebut telah banyak diketahui, namun tidak mudah diformulasikan dan diimplementasikan. Tujuan tulisan ini menyajikan hasil identifikasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan dan pendekatan penyelesaiannya. Identifikasi dilakukan terhadap 2 daerah yang memiliki angka kerusakan kawasan hutan tertinggi yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Hasil kajian didapat bahwa penyebab kerusakan secara umum terkait dengan aktivitas: konversi hutan alam, pembalakan liar, kebakaran hutan, lemahnya penegakan hukum, konflik tenurial, over eksploitasi, pengembangan infrastruktur dan pengelolaan hutan yang buruk. Pendekatan penyelesaian deforestasi dan degradasi hutan perlu melibatkan banyak sektor. Penyelesaian masalah kerusakan hutan tersebut harus dilakukan komprehensif meliputi: bidang kebijakan/hukum (harmonisasi kebijakan dan penegakan hukum), ekonomi (peningkatan pendapatan masyarakat), sosial-budaya (akses dan peran masyarakat/adat lokal, intensifikasi pertanian), tata kelola hutan (teknis pengelolaan dan kepastian kawasan), edukasi (intervensi muatan lokal) dan penyelesaian konflik tenurial. Faktor kebijakan, penegakan hukum, perbaikan tata kelola kehutanan, koordinasi antar pemangku kepentingan, penguatan sosial budaya, edukasi dan peningkatan ekonomi masyarakat sangat diperlukan dalam memformulasikan penyelesaian.

Keywords: hutan, degradasi, deforestasi, sumatera, kalimantan

1. PENDAHULUAN

Luas kerusakan hutan di Indonesia dalam setiap kurun waktu mengalami perubahan-perubahan yang sangat dinamis. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (2015) melaporkan angka deforestasi berturut-turut tahun 1990-1996 yaitu sebesar 1,87 juta ha/tahun, tahun 1996-2000 sebesar 3,51 juta ha/tahun, tahun 2000-2003 sebesar 1,08 juta ha/tahun, tahun 2003-2006 sebesar 1,17 juta ha/tahun, tahun 2006-2009 sebesar 0,83 juta ha/tahun, tahun 2009-2011 sebesar 0,45 juta ha/tahun dan tahun 2011-2012 sebesar 0,61 juta ha/tahun. Angka deforestasi pada periode penghitungan terakhir yaitu tahun 2012-2013 diperoleh nilai sebesar 0,73 juta ha/tahun. Sedangkan angka deforestasi bruto Indonesia tahun 2013 – 2014 sebesar 568,0 ribu ha/th.

Kerusakan ini telah berdampak negative pada peran ekologis, social ekonomi dan kultural hutan. Termasuk terganggunya jasa hutan, berkurangnya biodiversitas dan sumberdaya genetik. Tekanan pertambahan penduduk dan konversi hutan untuk berbagai kepentingan pembangunan telah memicu percepatan degradasi dan deforestasi hutan tersebut. Pusat Krisis Kesehatan melaporkan (2016)

menurunkan kualitas oksigen, penyebab banjir besar, bencana kekeringan, penyebab tanah longsor dan terganggunya siklus air.

Banyak hal yang menyebabkan kerusakan hutan ini terus berlangsung. UNDP (2013) melaporkan penyebab tidak langsung deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia terkait dengan perencanaan tata ruang yang tidak efektif, masalah-masalah tenurial, pengelolaan hutan yang tidak efisien dan efektif, serta penegakan hukum yang lemah dan maraknya korupsi di sektor kehutanan dan lahan. Sementara itu menurut Forest Watch Indonesia (2014) tingkat deforestasi yang masih tetap tinggi adalah karena sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.

Oleh karena itu, memahami dan memformulasikan pendekatan penyelesaian yang tepat sangat diperlukan. Berbagai faktor penyebab kerusakan tersebut telah banyak diketahui, namun tidak mudah diformulasikan dan diimplementasikan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metoda review pustaka dari berbagai sumber seperti prosiding dan media lainnya. Analisis diskriptif dilakukan untuk mengetahui hubungan antar faktor penyebab dan pendekatan penyelesaian yang bias ditempuh. Deforestasi dan degradasi hutan dalam tulisan ini dikategorikan dalam istilah kerusakan hutan. Namun demikian secara terpisah masing-masing memiliki arti spesifik. Menurut Angelsen (2010), Degradasi hutan adalah perubahan didalam hutan yang merugikan susunan atau fungsi tegakan hutan atau kawasan hutan sehingga menurunkan kemampuannya untuk menyediakan berbagai barang atau jasa. Menurut (FAO 1990; World Bank 1990) bahwa hilangnya

tutupan hutan secara permanen ataupun sementara merupakan deforestasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan

Kerusakan hutan disebabkan oleh beragam alasan. Hasil identifikasi faktor penyebab deforestasi dan degradasi hutan khususnya pada 2 region yaitu Sumatera dan Kalimantan di rangkum dari beberapa referensi disajikan pada Tabel 1 berikut ini

Tabel 1. Hasil identifikasi faktor penyebab deforestasi dan degradasi hutan

REGION	PENYEBAB	SUMBER
SUMATERA		
	1. Konversi Hutan alam menjadi Kebun Kelapa Sawit dan HTI	a
	2. Lemahnya penegakan hukum	
	3. Pembakaran lahan gambut	a
	4. Konflik kepemilikan lahan	a
	5. Ketidakpastian RTRWP	a
	6. Illegal logging dan gap supply dan demand	a
	7. <u>Tebang di luar blok, penebangan melebihi kapasitas, cuci mangkok</u>	a
	8. eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan	d
	9. <u>Kebakaran hutan</u>	a
	10. Pengelolaan hutan yang tidak baik	a
KALIMANTAN		
	1. Konversi hutan alam menjadi areal usaha (seperti kebun kelapa sawit, kebun karet, hutan tanaman industri, tambang)	a,b,c,d
	2. Peladangan berpindah (perambahan)	a,b,f
	3. Pembalakan liar	a,b
	4. Pembakaran hutan	a,b
	5. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dan sosial	a
	6. Tambak	a
	7. Perumahan/pengembang (transmigrasi)	a
	8. Penebangan melebihi kapasitas	a
	9. Pengelolaan hutan dan penegakan hukum yang buruk	a,b

Sumber:

a, Pustanling (2011); b, Pustanling (2012); c. Profauna (2013); d. CIFOR (2016); e Jazuli (2014), f. FAO (1990)

Tabel 1 memperlihatkan dengan jelas bahwa beberapa penyebab kerusakan hutan baik yang terkait deforestasi maupun degradasi di dua region banyak kesamaan, meski ada beberapa hal yang spesifik. Namun Sunderlin dan Resosudarmo (1996) mengutip pendapat-pendapat lain bahwa deforestasi di di pulau-pulau di luar Jawa terutama adalah sebagai akibat pertumbuhan kepadatan penduduk dan pertumbuhan jumlah petani kecil/rakyat di kawasan kawasan.

3.2. Keterkaitan Antar Faktor Penyebab

Secara umum masalah-masalah yang teridentifikasi di Sumatera dan Kalimantan tidak berdiri sendiri. Hampir semua saling terkait. Sebagai contoh konflik tenurial yang marak terjadi, hal ini dipicu oleh adanya tidak "clear and clean-nya" RTRWP di tingkat lapangan (tapak), tidak harmonisnya kebijakan dan pengelolaan pemberian izin usaha yang lemah, menyebabkan tumpang tindih areal perusahaan/kepemilikan. Demikian juga penegakan hukum untuk pembalakan liar dan kebakaran hutan, karena ketidakjelasan batas-batas areal usaha



menyebabkan upaya itu terkesan lambat, kompleks dan bahkan mungkin menyebabkan ketidakadilan pada sebagian pihak. Selain itu, keperluan hutan untuk infrastruktur jalan juga sering membawa kontroversi, terutama jalan tersebut harus menembus areal hutan konservasi. Dampak pembukaan ini dapat memicu illegal logging dan gangguan biodiversitas. Namun dari sisi ekonomi, infrastruktur ini sangat diperlukan untuk membuka akses daerah-daerah terpencil.

Demikian juga, pemberian izin kebun kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang diarahkan untuk lahan hutan yang kurang produktif, namun pada implementasinya tidak sepenuhnya demikian. Berdirinya pabrik pengelolaan CPO sawit dan Pulp berpotensi memicu pemberian izin usaha pada areal hutan yang kurang sasaran. Kontroversi sawit yang dituduh merusak oleh kalangan konservasionistpun tidak selamanya demikian. Menurut Cifor (2016) sawit tidak selalu menjadi hal buruk jika dikembangkan pada lahan deforestasi dan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Contoh lain, sebagaimana digambarkan Raharjo (2014) konsesi hutan (perusahaan penggerak roda ekonomi) terbukti berdampak signifikan terhadap laju deforestasi di Indonesia. Bahkan ditambahkannya beberapa studi menggambarkan bahwa dampak keberadaan perusahaan-perusahaan kehutanan hanya memberi dampak rendah pada peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di pedesaan (Counsell, 2007; Lescuyer, G. et al. 2012; van Dorp, 2007).

Profauna (2013) menggambarkan satu program pemerintah yang bahkan saling bertentangan pada MP3EI, meski program tersebut dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca, tetapi hampir mustahil berjalan beriringan karena target utama program MP3EI sendiri yakni meningkatkan pendapatan perkapita dan kenaikan nilai total perekonomian (PDB), dengan meningkatkan 22 kegiatan ekonomi utama termasuk di dalamnya batubara, minyak dan gas, kelapa sawit, karet dan perikanan yang lazim dikeruk dari bumi Kalimantan.

Pengelolaan dan pengawasan perusahaan hutan yang lemah juga telah memicu kerusakan hutan, sebagian pemegang izin usaha melanggar berupa over cutting/over exploitation, cuci mangkok, pelanggaran blok tebang/explorasi dan lain-lain. Gambaran-gambaran diatas mensiratkan betapa penyelesaian kerusakan hutan khususnya terkait deforestasi dan degradasi hutan memerlukan pendekatan yang comprehensive, karena penyelesaian suatu masalah dapat saling berangkai pada penyelesaian atau kesulitan baru bagi yang lain

3.3. Penyelesaian Beberapa Hal Penting

Beberapa penyebab kerusakan hutan yang teridentifikasi pada 2 region terdapat kesamaan antara lain terkait dengan aktivitas: konversi hutan alam, pembalakan liar, kebakaran hutan, lemahnya penegakan hukum, konflik tenurial, over eksploitasi, ancaman pengembangan infrastruktur dan pengelolaan hutan yang buruk.

Terkait hal itu, penyelesaian masalah deforestasi dan degradasi hutan akan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan tidak bisa saling pisahkan satu dengan yang lainnya. Kebijakan perbaikan praktek usaha kebun sawit dan hutan tanaman industri, misalnya, perlu diiringi dengan instrument kebijakan pengawasan dan pengelolaan hutan oleh pemerintah yang lebih baik, membuka peluang ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, implementasi punishment dan reward yang baik, perbaikan tata ruang dan lain-lain. Demikian juga terkait dengan kebakaran hutan, maka peningkatan kesadaran, pendidikan dan koordinasi antar stakeholder sangat diperlukan.

Pusanling (2011) melaporkan pendekatan penyelesaian deforestasi dan degradasi hutan perlu melibatkan banyak sektor. Penyelesaian masalah kerusakan hutan harus dilakukan komprehensif meliputi: bidang **kebijakan/hukum** (harmonisasi kebijakan dan penegakan hukum), **ekonomi** (peningkatan pendapatan masyarakat), **sosial-budaya** (akses dan peran masyarakat/adat lokal, intensifikasi pertanian), **tata kelola hutan** (teknis pengelolaan dan kepastian kawasan), **edukasi** (intervensi muatan lokal) dan penyelesaian konflik tenurial.

4. SIMPULAN

Memahami akar masalah dan memformulasikan pendekatan berbagai factor sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Faktor kebijakan, penegakan hukum, perbaikan tata kelola kehutanan, koordinasi antar pemangku kepentingan, penguatan social budaya, edukasi dan peningkatan ekonomi masyarakat menjadi hal sangat penting untuk menjadi pertimbangan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman kagamahut yang telah mendukung penyediaan bahan-bahan untuk penyempurnaan paper ini. Juga untuk angkeringan "Mas No" dengan segala menu-menu khususnya, sangat membantu kelancaran penulisan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Cifor. 2016. *Mempelajari penyebab deforestasi di Kalimantan*. <https://blog.cifor.org> didownload 7 Agustus 2017

- Counsell, S. (2007). *Logged to death: The impacts of the tropical timber industry on human health*. In S. Counsell, C. Long, and S. Wilson (Eds.), *Concessions to poverty: The environmental, social and economic impacts of industrial logging concessions in Africa's rainforests*. Rainforest Foundation, London, UK.
- Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan. 2015. *Deforestasi Indonesia tahun 2013 – 2014*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- FAO. 1990. *Situation and Outlook of the Forestry Sector in Indonesia*. Volume 1: issues, findings and opportunities. Ministry of Forestry, Government of Indonesia; Food and Agriculture Organization of the United Nations, Jakarta.
- Forest Watch Indonesia. 2014. *Potret keadaan hutan indonesia periode 2009-2013*. Bogor
- Jazuli, A. 2014. *Kebakaran hutan dan lahan di riau menurut perspektif hukum lingkungan*. Jurnal RechtsVinding Online http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online didownload 4 Agustus 2017
- Lescuyer, G., Mvondo, S. A., Essoungou, J. N., Toison, V., Trébuchon, J. F., & Fauvet, N. (2012). *Logging concessions and local livelihoods in Cameroon: from indifference to alliance?*. *Ecology & Society*, 17(1), 7.
- Raharjo, JT. 2014. *The impacts of forest concessions on deforestation in indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Menuju Tata Kelola Hutan dan Lahan Lestari 18-19 November 2014.
- UNDP, 2013. *Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di Indonesia*.
- Pusat Krisis Kesehatan. 2016. <http://penanggulangankrisis.kemkes.go.id/dampak-buruk-akibat-kerusakan-hutan-bagi-kehidupan>. didownload 5 Agustus 2017
- Pustanling, 2011. *Workshop penyebab deforestasi dan degradasi hutan serta identifikasi aktivitas yang menyebabkan pengurangan emisi, peningkatan serapan dan stabilisasi stok karbon*. *Laporan*. Pusat Standardisasi dan Lingkungan. Dephut. Jakarta
- Sunderlin, WD dan I.A.P Resosudarmo. 1996. *Laju dan penyebab deforestasi di indonesia: penelaahan kerancuan dan penyelesaiannya*. CIFOR. Bogor
- Van Dorp, M. (2007). *Economic impacts of industrial logging concessions: What are the benefits?*. In S. Counsell, C. Long, & S. Wilson (Eds.), *Concessions to poverty: The environmental, social and economic impacts of industrial logging concessions in Africa's rainforests*. Rainforest Foundation, London, UK